

BAB III

DESKRIPSI ISU

A. DESKRIPSI ISU (GAMBARAN PROSES PENETAPAN ISU)

Berdasarkan hasil konsultasi dan diskusi bersama coach, mentor, rekan kerja dan sesama CPNS di lingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Papua Selatan, maka penulis merumuskan tiga isu yaitu:

1. Kurangnya Kemandirian Dinas Kominfo Papua Selatan dalam Pengelolaan Website Pemerintahan.

Website resmi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Papua Selatan telah dikelola melalui server internal dinas, namun pengelolaannya masih belum sepenuhnya mandiri. Permasalahan muncul karena akses teknis, pembaruan sistem, dan pemeliharaan website belum dapat dilakukan secara internal oleh ASN dinas. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas dan sistem pengelolaan website masih terbatas, sehingga setiap perubahan atau perbaikan memerlukan waktu lama dan koordinasi tambahan dengan pihak lain yang memahami teknis sistem. Kondisi ini berdampak pada keterlambatan pembaruan informasi publik, menurunnya efektivitas komunikasi kelembagaan, serta belum terwujudnya kemandirian digital di lingkungan Dinas Kominfo Papua Selatan.

2. Belum Tersedianya Panduan Digital Resmi dalam Penerapan Aplikasi SRIKANDI di Dinas Kominfo Papua Selatan.

Penerapan aplikasi SRIKANDI di lingkungan Dinas Kominfo Provinsi Papua Selatan belum berjalan optimal karena hingga kini belum tersedia panduan digital resmi sebagai acuan bagi ASN dalam mengoperasikan aplikasi tersebut. ASN masih belajar secara mandiri melalui sumber eksternal seperti YouTube dan panduan dari daerah lain. Akibatnya, terjadi perbedaan pemahaman dalam penggunaan fitur aplikasi, belum adanya keseragaman tata kelola naskah dinas elektronik, serta belum maksimalnya kesiapan dinas dalam mendukung penerapan SRIKANDI secara menyeluruh di tahun 2026.

3. Rendahnya Kesadaran ASN terhadap Keamanan Data dan Akun Digital di Lingkungan Dinas Kominfo Papua Selatan.

Sebagian ASN di lingkungan Dinas Kominfo Provinsi Papua Selatan masih memiliki kesadaran yang rendah terhadap keamanan data dan akun digital, baik pribadi maupun kedinasan. Banyak ASN belum menerapkan prinsip keamanan dasar seperti penggunaan kata sandi yang kuat, pergantian password secara berkala, serta kehati-hatian dalam mengakses aplikasi pemerintahan. Kondisi ini menimbulkan risiko kebocoran data, penyalahgunaan akun oleh pihak luar, dan ancaman terhadap keamanan sistem informasi pemerintahan. Situasi tersebut menunjukkan perlunya peningkatan literasi dan budaya keamanan digital (cybersecurity awareness) bagi ASN dalam menghadapi transformasi digital pemerintahan.

B. PENETAPAN ISU UTAMA

Dalam proses penyusunan kegiatan aktualisasi, langkah penting yang dilakukan sebelum menentukan isu utama adalah melakukan penapisan isu. Tapisan isu bertujuan untuk memilih isu yang paling strategis, relevan, dan layak ditangani oleh peserta Latsar CPNS sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Teknik ini digunakan untuk memastikan bahwa isu yang diangkat tidak hanya aktual, tetapi juga memiliki urgensi dan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kinerja organisasi. Salah satu metode yang digunakan dalam proses penetapan isu adalah teknik tapisan USG, yaitu analisis yang menilai tingkat Urgency (Kedeshakan/Keperluan Mendesak), Seriousness (Tingkat Keseriusan Dampak), dan Growth (Potensi Perkembangan Masalah di Masa Depan) dari suatu isu. Metode ini umum digunakan dalam kegiatan pelatihan dasar CPNS karena bersifat objektif, sistematis, dan terukur dalam membantu peserta menentukan isu prioritas yang paling tepat untuk diaktualisasikan.

Tabel. Analisa Kriteria USG

NO	ISU	U (Urgency)	S (Seriousness)	G (Growth)	Total Skor	Keterangan
1	Kurangnya Kemandirian Dinas Kominfo Papua Selatan dalam Pengelolaan Website Pemerintahan	5	5	4	14	Isu sangat mendesak karena berdampak langsung pada efektivitas komunikasi publik dan keterbukaan informasi pemerintahan. Website merupakan media utama pelayanan informasi kepada masyarakat. Kemandirian digital yang rendah menghambat responsivitas instansi dan menurunkan citra organisasi. Jika tidak segera diatasi, akan menghambat implementasi SPBE dan Smart Governance.
2	Belum Tersedianya Panduan Digital Resmi dalam Penerapan Aplikasi SRIKANDI di Dinas.	4	4	3	11	Isu bersifat penting namun belum mendesak, karena penerapan SRIKANDI masih dalam tahap persiapan dan akan disosialisasikan secara menyeluruh pada tahun 2026. Dampaknya belum langsung terhadap pelayanan publik, tetapi perlu penanganan untuk meningkatkan kesiapan internal ASN.
3	Rendahnya Kesadaran ASN terhadap Keamanan Data dan Akun Digital di Lingkungan Dinas Kominfo Papua	3	4	4	11	Isu penting karena berkaitan dengan keamanan informasi dan literasi digital ASN. Namun tingkat urgensinya masih lebih rendah dibanding pengelolaan website, karena dampak langsungnya belum dirasakan secara luas. Perlu dilakukan pembiasaan (habitiasi) jangka panjang melalui pelatihan dan sosialisasi keamanan siber.

Berdasarkan hasil analisis tapisan USG, isu dengan skor tertinggi ditetapkan sebagai **isu utama aktualisasi**, yaitu **“Kurangnya Kemandirian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Papua Selatan dalam Pengelolaan Website Pemerintahan”**. Isu ini dipilih

karena memiliki tingkat urgensi dan dampak paling besar terhadap peningkatan efektivitas pelayanan informasi publik serta penguatan kemandirian digital ASN di lingkungan Dinas Kominfo Papua Selatan.

C. PENENTUAN PENYEBAB ISU UTAMA

Dalam tahap ini, dilakukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi akar penyebab dari isu utama yang telah terpilih, yaitu *“Kurangnya Kemandirian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Papua Selatan dalam Pengelolaan Website Pemerintahan.”* Analisis akar permasalahan bertujuan untuk menemukan faktor-faktor penyebab mendasar yang memengaruhi munculnya permasalahan secara sistemik, sehingga dapat disusun alternatif solusi yang tepat dan berkelanjutan. Untuk menganalisis akar penyebab permasalahan secara komprehensif dan sistematis, digunakan pendekatan metode Fishbone Diagram atau Ishikawa Diagram. Metode ini merupakan salah satu teknik analisis manajemen mutu yang dikembangkan oleh Kaoru Ishikawa (1968), dan sering digunakan untuk menemukan hubungan sebab-akibat dalam suatu permasalahan organisasi. Pendekatan ini efektif dalam mengidentifikasi penyebab-penyebab utama dari suatu masalah melalui pemetaan berdasarkan kategori faktor manajerial yang saling berkaitan. Berdasarkan hasil identifikasi di atas, dapat disimpulkan bahwa akar penyebab utama dari kurangnya kemandirian Dinas Kominfo Papua Selatan dalam pengelolaan website pemerintahan berasal dari beberapa aspek berikut:

1. Aspek SDM (Human Resources):

Kapasitas ASN di bidang teknologi informasi masih terbatas, di mana sebelumnya pengelolaan website dan server hanya dilakukan oleh beberapa pegawai tertentu tanpa adanya program pelatihan internal berkelanjutan, sehingga proses pengelolaan sistem digital belum berjalan optimal.

2. Aspek Metode dan Prosedur:

Tidak adanya SOP dan panduan kerja baku menyebabkan pengelolaan website bersifat tidak terstruktur dan bergantung pada individu tertentu.

3. Aspek Lingkungan Organisasi:

Budaya kerja digital dan kebijakan internal tentang kemandirian teknologi informasi belum terbentuk secara kuat.

4. Aspek Teknologi dan Infrastruktur:

Meskipun Dinas Kominfo telah memiliki server internal sebagai pusat pengelolaan data pemerintahan, kapasitas dan penerapan sistemnya masih terbatas karena belum seluruh aplikasi terintegrasi serta belum diterapkannya sistem keamanan, kontrol akses, dan backup data secara optimal.

5. Aspek Pendanaan:

Anggaran untuk pengembangan kapasitas SDM dan sistem pemeliharaan teknologi masih terbatas dan belum menjadi prioritas program bidang APTIKA.

D. ANALISA APABILA ISU UTAMA TIDAK DAPAT DI SELESAIKAN

Apabila isu kurangnya kemandirian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Papua Selatan dalam pengelolaan website pemerintahan tidak segera diselesaikan, maka akan menimbulkan dampak signifikan terhadap efektivitas kinerja organisasi, tata kelola informasi publik, dan citra kelembagaan pemerintah daerah. Keterlambatan dalam pembaruan konten dan penanganan teknis website akan menghambat arus informasi kepada masyarakat serta menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Selain itu, ketergantungan terhadap pihak luar dalam pengelolaan sistem digital berpotensi menimbulkan risiko keamanan data dan menghambat pengembangan kapasitas ASN di bidang teknologi informasi. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh Dinas Kominfo sebagai instansi teknis, tetapi juga oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bergantung pada layanan informasi digital, serta masyarakat sebagai penerima manfaat utama dari layanan publik berbasis teknologi. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (*Smart Governance*) yang efisien, aman, dan mandiri di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan.

E. KETERKAITAN ISU UTAMA DENGAN AGENDA KE TIGA

Isu utama yang diangkat dalam kegiatan aktualisasi ini, yaitu ***“Kurangnya Kemandirian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Papua Selatan dalam Pengelolaan Website Pemerintahan,”*** memiliki keterkaitan langsung dengan Agenda III Latsar CPNS, yang berfokus pada ***Kedudukan dan Peran ASN dalam Mendukung Terwujudnya Smart Governance***. Agenda ini menekankan pentingnya peran ASN dalam membangun sistem pemerintahan yang cerdas, efektif, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam konteks Dinas Kominfo, website pemerintahan merupakan salah satu pilar utama Smart Governance karena berfungsi sebagai media publikasi, komunikasi, serta sarana transparansi informasi yang memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Kemandirian Dinas Kominfo dalam mengelola website secara internal mencerminkan penerapan konsep Smart ASN, yaitu ASN yang memiliki literasi digital tinggi, mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi, serta berperan aktif dalam transformasi digital pemerintahan. Upaya peningkatan kapasitas internal ASN di bidang teknologi informasi mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (*e-Government*) yang terintegrasi dan berkelanjutan. Dalam hal ini, penguatan kemampuan ASN dalam pengelolaan website tidak hanya berdampak pada efisiensi kerja organisasi, tetapi juga memperkuat budaya kerja berbasis inovasi dan kolaborasi digital di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan.

Lebih lanjut, isu ini juga sejalan dengan materi pembelajaran pada Agenda III yang meliputi *Manajemen ASN* dan *Smart ASN*, di mana ASN diharapkan memahami perannya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa dalam era digital. Melalui penyelesaian isu ini, ASN berperan aktif dalam memperkuat kapasitas kelembagaan Dinas Kominfo untuk menjadi instansi yang mandiri dalam pengelolaan sistem informasi, sekaligus mewujudkan nilai-nilai profesionalisme, akuntabilitas, dan inovasi yang menjadi fondasi Smart Governance. Dengan demikian, penyelesaian isu ini bukan hanya bentuk aktualisasi kompetensi ASN yang berorientasi pada pelayanan publik, tetapi juga kontribusi nyata dalam membangun birokrasi yang adaptif, responsif, dan siap menghadapi tantangan transformasi digital pemerintahan.

F. GAGASAN KREATIF PEMECAHAN MASALAH UTAMA

Kurangnya kemandirian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Papua Selatan dalam pengelolaan website pemerintahan disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi, belum tersedianya panduan teknis baku sebagai acuan kerja, serta belum optimalnya pemanfaatan server internal secara mandiri. Menyikapi hal tersebut, dinas telah melakukan pengembangan website resmi yang seluruh prosesnya ditangani oleh SDM internal dan kini telah mencapai tahap penyelesaian sebesar 98%, dengan rencana pengelolaan sepenuhnya dialihkan ke Bidang Aplikasi Informatika (APTIKA) sebagai langkah strategis memperkuat kemandirian digital instansi. Berdasarkan kondisi tersebut, dirumuskan gagasan kreatif pemecahan masalah berupa **“Penyusunan Panduan Teknis Digital Pengelolaan Website Pemerintahan sebagai Upaya Penguatan Kemandirian Digital Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Papua Selatan.”** Gagasan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi ASN dalam pengelolaan website secara profesional, sistematis, dan berkelanjutan melalui penyusunan panduan digital yang memuat tata cara pembaruan konten, pengaturan akses pengguna (*user privilege*), mekanisme keamanan data, dan prosedur *backup* sistem, serta menjadi sarana *transfer knowledge* antarbidang di lingkungan dinas, khususnya antara **Bidang APTIKA** dan **Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP)** guna membangun kolaborasi dan peningkatan kompetensi internal di bidang teknologi informasi.

Adapun gagasan kreatif ini akan diaktualisasikan melalui empat langkah kegiatan utama yang berorientasi hasil, yaitu:

- a. Melakukan observasi dan pengumpulan data teknis.
- b. Menyusun Panduan Teknis Digital Pengelolaan Website Pemerintahan.
- c. Melaksanakan kegiatan berbagi pengetahuan (*knowledge sharing*).
- d. Melaksanakan sosialisasi internal dan uji coba penerapan panduan teknis digital.

G. FORMAT RANCANGAN AKTUALISASI

Unit Kerja	: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Papua Selatan.
Isu yang diangkat	: Kurangnya Kemandirian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Papua Selatan dalam Pengelolaan Website Pemerintahan.
Gagasan pemecahan isu	: Penyusunan Panduan Teknis Digital Pengelolaan Website Pemerintahan sebagai Upaya Penguatan Kemandirian Digital Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Papua Selatan.
Tujuan gagasan pemecahan isu	: Meningkatkan kemandirian dan kompetensi ASN dalam pengelolaan website pemerintahan melalui penyusunan panduan teknis digital yang terstandar, efektif, dan berkelanjutan sebagai pedoman kerja di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Papua Selatan.

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Visi Misi	Penguatan Nilai Organisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Observasi dan Pengumpulan Data Teknis.	Mengidentifikasi struktur menu dan fitur utama dalam website Dinas Kominfostansan baru dan lama.	Output : Data tampilan fitur. Hasil : Dokumen	Manajemen ASN dan SMART ASN <ul style="list-style-type: none">• Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. (Kompeten)• Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. (Adaptif)• Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. (Akuntabel)	Visi: Terwujudnya Papua Bangkit, Mandiri & Sejahtera. Misi: 1. Memantapkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM). 2. Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>).	a. Kompeten b. Adaptif c. Akuntabel d. Kolaboratif
		Melakukan wawancara internal dengan staf Bidang APTIKA dan Bidang IKP	Output : form hasil wawancara. Hasil : Dokumen	<ul style="list-style-type: none">• Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. (Kolaboratif)• Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik (Kompeten)• Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab (Akuntabel)		
		Melakukan dokumentasi hasil observasi dalam bentuk catatan teknis atau laporan	Output : Hasil dari observasi dari kegiatan 2 kegiatan sebelumnya. Hasil : Dokumen.	<ul style="list-style-type: none">• Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. (Akuntabel)• Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. (Kompeten)		

DESKRIPSI KEGIATAN 1

1. Keterkaitan dengan MANAJEMEN ASN dan SMART ASN

- a. Manajemen ASN : Mencerminkan pelaksanaan fungsi perencanaan, pengorganisasian, dan pelaporan kinerja berbasis data untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab jabatan.
- b. SMART ASN : Menunjukkan kemampuan ASN untuk beradaptasi terhadap perkembangan teknologi, berkolaborasi lintas bidang, serta memanfaatkan sistem digital dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan inovatif.

2. Keterkaitan dengan nilai – nilai dasa ASN BerAKHLAK

- a. Tahapan 1.
Kompeten : Melakukan analisis dan identifikasi struktur website dengan ketelitian dan hasil yang bisa digunakan sebagai dasar panduan teknis.
Adaptif : Mampu beradaptasi dengan sistem website baru dan perkembangan teknologi di lingkungan kerja digital.
Akuntabel : Identifikasi terdokumentasi dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bukti kinerja profesional ASN.
- b. Tahapan 2.
Kolaboratif : kegiatan ini melibatkan kerja sama dan komunikasi aktif antara Bidang APTIKA dan IKP untuk mencapai pemahaman bersama.
Kompeten : melakukan wawancara dengan tujuan mengumpulkan data yang akurat dan bermanfaat untuk penyusunan panduan teknis digital.
Akuntabel : hasil wawancara didokumentasikan secara sistematis dan digunakan sebagai dasar resmi penyusunan panduan teknis.
- c. Tahapan 3.
Akuntabel : membuat dokumentasi hasil observasi secara lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kompeten : laporan yang dibuat menjadi dasar penting untuk penyusunan panduan teknis dan pengambilan keputusan dinas.

3. Kontribusi kegiatan terhadapn Visi dan Misi Dinas.

Kegiatan ini berkontribusi terhadap terwujudnya visi “Papua Bangkit, Mandiri & Sejahtera” dengan mendukung peningkatan kompetensi digital ASN dan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, melalui pengelolaan informasi publik yang transparan, efisien, dan akuntabel di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Papua Selatan.

4. Keterkaitan terhadap nilai – nilai Organisasi

Ketiga kegiatan mencerminkan nilai **Kompeten**, **Adaptif**, **Akuntabel**, dan **Kolaboratif** melalui peningkatan kemampuan teknis ASN, adaptasi terhadap sistem digital, tanggung jawab dalam pelaporan hasil kerja, serta sinergi antarbidang dalam mewujudkan pengelolaan website pemerintahan yang mandiri dan efektif.

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Visi Misi	Penguatan Nilai Organisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Menyusun Panduan Teknis Digital Pengelolaan Website Pemerintahan.	Menyusun dokumen panduan dalam format digital (PDF dan interaktif) yang berisi tata cara pengelolaan.	Output : Data Panduan Langkah. Hasil : Dokumen	Manajemen ASN dan SMART ASN <ul style="list-style-type: none">• Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik (Kompeten)• Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. (Akuntabel)	Visi: Terwujudnya Papua Bangkit, Mandiri & Sejahtera. Misi: 1. Memantapkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM). 3. Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>).	a. Kompeten b. Adaptif c. Akuntabel d. Kolaboratif
		Menuliskan langkah-langkah teknis pengaturan <i>user account</i> , hak akses admin dan editor, sistem keamanan berbasis kata sandi dan <i>backup</i> .	Output : Dokumen Word dan PDF Hasil : Dokumen	<ul style="list-style-type: none">• Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. (Kompeten)• Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. (Akuntabel)		
		Membuat desain tata letak panduan yang menarik dan mudah dipahami	Output : Tangkapan Layar. Hasil : Dokumen.	<ul style="list-style-type: none">• Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. (Kolaboratif)• Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. (Kompeten)		
		Melakukan validasi panduan dengan Kasi Aplikasi Informatika Pemerintahan dan tim pengelola website.	Output : Hasil Konsultasi. Hasil : Dokumen.	<ul style="list-style-type: none">• Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. (Kompeten)• Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. (Kolaboratif)• Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. (Akuntabel)		

DESKRIPSI KEGIATAN 2

1. Keterkaitan dengan MANAJEMEN ASN dan SMART ASN

- a. Manajemen ASN : Keempat kegiatan tersebut mencerminkan penerapan fungsi **perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kinerja ASN** dalam menghasilkan panduan kerja digital yang sistematis dan terstandar, guna meningkatkan efektivitas serta akuntabilitas pelaksanaan tugas di lingkungan pemerintahan.
- b. SMART ASN : Kegiatan ini juga menggambarkan karakteristik **Smart ASN** yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, berinovasi dalam tata kelola digital, serta membangun kolaborasi lintas bidang untuk mewujudkan pemerintahan yang profesional, efisien, dan berbasis teknologi informasi.

2. Keterkaitan dengan nilai – nilai dasar ASN BerAKHLAK

- a. Tahapan 1.
Kompeten : Menyusun panduan digital yang sistematis, mudah dipahami, dan bermanfaat bagi peningkatan kinerja instansi.
Akuntabel: Dokumen panduan disusun secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai acuan resmi kerja.
- b. Tahapan 2.
Kompeten : Kegiatan ini membutuhkan ketelitian dan kemampuan teknis dalam pengaturan hak akses dan keamanan sistem.
Akuntabel : Bertanggung jawab menjaga keamanan sistem dan memastikan akses data sesuai prosedur.
- c. Tahapan 3.
Kolaboratif : Desain panduan disusun dengan memperhatikan masukan dari bidang lain agar hasilnya bermanfaat bagi seluruh pegawai.
Kompeten : Menyusun desain panduan dengan memperhatikan kejelasan, estetika, dan kemudahan dipahami oleh pengguna.
- d. Tahapan 4.
Akuntabel : Validasi memastikan hasil kerja sesuai standar dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional
Kolaboratif : Melibatkan koordinasi dan kerja sama antara pejabat struktural dan tim teknis untuk menyempurnakan panduan.
Kompeten : Terbuka terhadap evaluasi dan berkomitmen menghasilkan panduan yang efektif, sistematis, dan bermanfaat.

3. Kontribusi kegiatan terhadap Visi dan Misi Dinas.

Keempat kegiatan ini mendukung **visi “Papua Bangkit, Mandiri & Sejahtera”** melalui penguatan kapasitas ASN dalam pengelolaan teknologi informasi. Kegiatan ini mendukung peningkatan kualitas SDM dan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyusunan panduan digital yang sistematis, aman, dan mudah diterapkan.

4. Keterkaitan terhadap nilai – nilai Organisasi

Keempat kegiatan tersebut mencerminkan nilai **Kompeten, Adaptif, Akuntabel, dan Kolaboratif** melalui peningkatan kemampuan ASN dalam menyusun panduan digital secara profesional, kemampuan beradaptasi dengan teknologi informasi, tanggung jawab dalam menjamin keamanan dan keakuratan data, serta kerja sama lintas bidang dalam validasi dan penerapan panduan pengelolaan website pemerintahan.

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Visi Misi	Penguatan Nilai Organisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Melaksanakan kegiatan berbagi pengetahuan (<i>knowledge sharing</i>).	Menyelenggarakan sesi diskusi internal Bidang APTIKA.	Output : Diskusi Persiapan. Hasil : Dokumentasi.	Manajemen ASN dan SMART ASN <ul style="list-style-type: none">• Membantu orang lain belajar.(Kompeten)• Antusias dalam mengadopsi teknologi baru. (Adaptif)• Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. (Kolaboratif)	Visi: Terwujudnya Papua Bangkit, Mandiri & Sejahtera. Misi: 1. Memantapkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM). 2. Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>).	a. Kompeten b.Adaptif c. Akuntabel d.Kolaboratif
		Melakukan simulasi langsung pengelolaan website bersama Bidang IKP.	Output : Dokumen dan Dokumentasi Hasil : Dokumen dan Gambar	<ul style="list-style-type: none">• Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. (Kompeten)• Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. (Kolaboratif)• Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. (Adaptif)		
		Membuka forum diskusi antara bidang APTIKA dan IKP untuk menyamakan pemahaman terkait pembagian peran dan tanggung jawab pengelolaan website.	Output : Diskusi Hasil : Gambar/foto	<ul style="list-style-type: none">• Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. (Kolaboratif)• Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. (Akuntabel)• Membantu orang lain belajar.(Kompeten)		

DESKRIPSI KEGIATAN 3

1. Keterkaitan dengan MANAJEMEN ASN dan SMART ASN

- a. Manajemen ASN : Kegiatan ini mencerminkan penerapan **fungsi koordinasi, pembinaan, dan pengorganisasian kinerja ASN** melalui diskusi internal, simulasi kerja, dan forum lintas bidang untuk menyamakan peran serta tanggung jawab. Hal ini mendukung efektivitas kerja tim, peningkatan kompetensi, dan optimalisasi kolaborasi
- b. SMART ASN : Kegiatan ini juga mencerminkan karakteristik **Smart ASN** yang berorientasi pada kolaborasi, inovasi, dan adaptasi terhadap teknologi. Melalui komunikasi digital dan kerja lintas bidang, ASN menunjukkan kemampuan berpikir kritis, bekerja sama secara interaktif, serta memanfaatkan teknologi informasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern dan responsif.

2. Keterkaitan dengan nilai – nilai dasar ASN BerAKHLAK

- a. Tahapan 1.

Kompeten : Diskusi internal menjadi sarana berbagi pengetahuan dan peningkatan kompetensi tim.

Adaptif : Kegiatan ini dapat dilakukan dengan dukungan platform digital untuk efisiensi komunikasi dan kolaborasi.

Kolaboratif : Kegiatan ini mendorong kerja sama, partisipasi, dan komunikasi antarpegawai dalam satu bidang.

- b. Tahapan 2.

Kompeten : Menunjukkan kemampuan teknis dalam mengelola dan memperbarui website secara profesional..

Kolaboratif : Kegiatan ini melibatkan kerja sama dan sinergi antara Bidang APTIKA dan Bidang IKP dalam pengelolaan website.

Adaptif : Menyesuaikan diri dengan sistem digital dan proses kerja baru dalam tata kelola informasi pemerintahan.

- c. Tahapan 3.

Kolaboratif : Kegiatan ini melibatkan partisipasi aktif antarbidang untuk mencapai kesepakatan dalam tugas bersama.

Kompeten : Forum diskusi menjadi sarana berbagi pengetahuan dan pengalaman teknis dalam pengelolaan website.

Akuntabel : Pembagian peran dan tanggung jawab dibahas secara terbuka agar setiap pihak memahami kewajibannya dengan jelas

3. Kontribusi kegiatan terhadap Visi dan Misi Dinas.

Ketiga kegiatan tersebut mendukung visi “Papua Bangkit, Mandiri & Sejahtera” melalui penguatan kolaborasi dan kompetensi ASN dalam pengelolaan sistem informasi. Kegiatan ini selaras dengan misi peningkatan kualitas SDM dan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui koordinasi, pembagian peran yang jelas, serta pengelolaan website yang transparan dan profesional di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Papua Selatan.

4. Keterkaitan terhadap nilai – nilai Organisasi

Ketiga kegiatan tersebut mencerminkan nilai Kompeten, Adaptif, Akuntabel, dan Kolaboratif melalui peningkatan kemampuan teknis ASN, tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas, serta kemampuan beradaptasi dengan sistem digital. Kegiatan ini juga memperkuat kerja sama lintas bidang dalam mewujudkan pengelolaan website pemerintahan yang efektif, transparan, dan profesional di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Papua Selatan.